

IMPLEMENTASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PEMBELAJARAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BAGI MGMP KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI KEUANGAN LEMBAGA DI KABUPATEN PEMALANG

Mirasanti Wahyuni^{1)*}, Kusmayadi²⁾, Didiek Susilo Tamtomo³⁾, Marliyati⁴⁾, Dewi Sri Marsanti⁵⁾, Sulistiyo⁶⁾, Ch. Retno Gayatrie⁷⁾, Ardian Widiarto⁸⁾, M. Hasanudin⁹⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang,
Jl. Prof. Soedharto, Semarang, 50275
*Email: mirasanti.wahyuni@polines.ac.id

Abstract

Managing company accounting for goods and services for small and medium companies is a skill possessed by graduates of Institute Accounting and Finance competencies. The ability of this competency requires the latest insight and knowledge in line with developments in the world of work. One of the latest knowledge that must be provided in class is the implementation of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). Accounting and taxation is one of the mandatory subjects in the Institute's accounting and finance competency. Teachers are required to update their knowledge as a responsibility to provide learning materials in class. The enactment of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) on 29 October 2021 is a new provision that should be provided in the study of accounting and taxation subjects.

Keywords: *of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), Accounting*

Abstrak

Pengelolaan akuntansi perusahaan barang dan jasa bagi perusahaan kecil dan menengah merupakan kemampuan yang dimiliki bagi para lulusan kompetensi Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kemampuan atas kompetensi ini memerlukan wawasan dan pengetahuan terbaru sejalan dengan perkembangan dunia kerja. Salah satu pengetahuan terbaru yang wajib diberikan di kelas adalah pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Akuntansi dan perpajakan merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada kompetensi akuntansi dan keuangan Lembaga. Para guru wajib memperbaharui keilmuannya sebagai tanggung jawab pemberian materi pembelajaran di kelas. Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021 merupakan ketentuan baru yang seharusnya diberikan dalam pembelajaran mata pelajaran akuntansi dan perpajakan.

Kata Kunci: **Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Akuntansi.**

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Jumlah Jenjang Pendidikan SMK di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.577 sekolah.

Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) merupakan satu kompetensi keahlian yang ada di SMK. Kemampuan yang dimiliki bagi para lulusan kompetensi AKL adalah Ahli di bidang administrasi keuangan, yang meliputi mampu membuat pengelolaan akuntansi perusahaan barang dan jasa, serta mampu menyajikan laporan keuangan perusahaan kecil dan menengah.

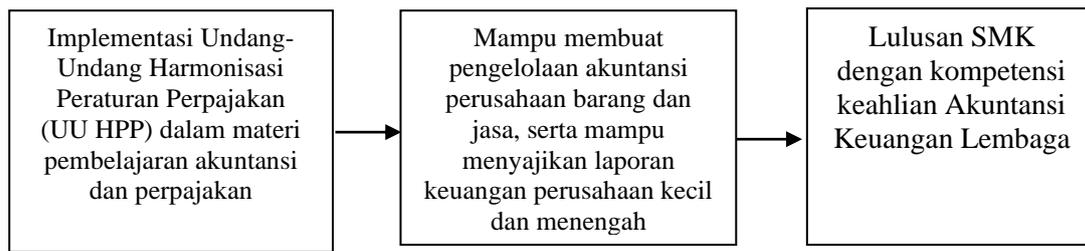
Beberapa peluang kerja bagi lulusan dengan kompetensi akuntansi dan keuangan Lembaga, diantaranya staf akuntan, internal auditor, perencanaan keuangan, analis kredit, kasir, *teller bank, customer service bank, budgeting staff*.

Pengelolaan akuntansi perusahaan barang dan jasa bagi perusahaan kecil dan menengah merupakan kemampuan yang dimiliki bagi para lulusan kompetensi Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kemampuan atas kompetensi ini memerlukan wawasan dan pengetahuan terbaru sejalan dengan perkembangan dunia kerja. Salah satu pengetahuan terbaru yang wajib diberikan di kelas adalah pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Akuntansi dan perpajakan merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada kompetensi akuntansi dan keuangan Lembaga. Para guru wajib memperbaharui keilmuannya sebagai tanggung jawab pemberian materi pembelajaran di kelas. Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021 merupakan ketentuan baru yang seharusnya diberikan dalam pembelajaran mata pelajaran akuntansi dan perpajakan.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan forum yang memfasilitasi berkumpulnya guru mata pelajaran yang sama untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Kompetensi keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga juga mempunyai wadah MGMP. Beberapa pertemuan dalam MGMP AKL bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di kelas, khususnya bagi kompetensi Akuntansi Keuangan Lembaga. Berdasarkan kebutuhan akan materi pelajaran akuntansi dan perpajakan pada SMK Bidang Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga, maka perlu diadakan pelatihan Implementasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi guru-guru SMK yang tergabung dalam MGMP Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga.

Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021, memberi dampak pada materi pembelajaran siswa SMK kompetensi keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Berdasarkan analisis situasi permasalahan pada MGMP Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga di Kabupaten Pematang, maka permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah Bagaimana implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam materi pembelajaran akuntansi dan perpajakan, sehingga diharapkan lulusan SMK Kompetensi Akuntansi Keuangan Lembaga dapat menyusun laporan keuangan perusahaan kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dari permasalahan yang ada maka dapat dibuat bagan permasalahan sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan Permasalahan Mitra

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Implementasi UU HPP bertujuan untuk:

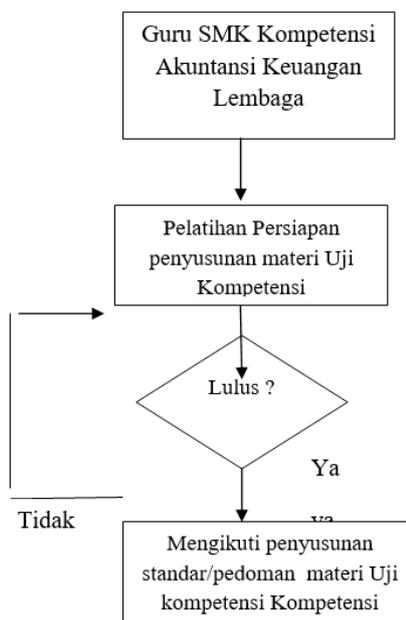
1. Memberikan pelatihan implementasi UU HPP kepada guru-guru mata pelajaran akuntansi dan perpajakan yang tergabung dalam MGMP keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga di Kabupaten Pemalang,
2. Memberikan panduan praktis implementasi UU HPP kepada guru-guru mata pelajaran akuntansi dan perpajakan yang tergabung dalam MGMP keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga di Kabupaten Pemalang.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang ditawarkan pada kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. Perancangan Materi UU HPP
- b. Aktivitas Praktik
- c. Pelatihan
- d. Evaluasi

Kerangka pemecahan masalah yang diterapkan dalam kegiatan pelatihan peningkatan dalam penyusunan materi uji kompetensi Teknisi Akuntansi ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Diagram Alir Kerangka Pemecah Masalah

Pada pelaksanaan program ini pihak SMK di Kabupaten Pemalang sebagai mitra menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Semarang, melalui kerjasama ini, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak, SMK di Kabupaten Pemalang akan menyediakan tempat dan Tim Pengabdian akan memberikan jasa untuk memberikan Tip dan Trik dalam pelatihan kepada guru yang tergabung dalam MGMP Akuntansi SMK di Kabupaten Pemalang untuk persiapan pelatihan dalam mempersiapkan materi uji kompetensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Implementasi UU HPP telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan tentang Implementasi UU HPP pada hari Rabu 3 Juli 2024 di SMK Negeri 1 Randudongkal dengan peserta guru-guru yang tergabung dalam MGMP Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Kabupaten Pemalang. Materi memiliki bobot 32 jam yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas Ketentuan Umum Perpajakan (4)
2. Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi (8)
3. Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan (8)
4. Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (4)
5. Dampak Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan (8)



Gambar 2. Pelatihan Tentang Implementasi UU HPP

UU HPP berlaku kepada:

1. HPP - Pajak Penghasilan Orang Pribadi
2. HPP – Pajak Penghasilan Badan:

- o - Omzet < 4,8 Milyar (UMKM)
- o - Omzet > 4,8 Milyar - 50 Milyar
- o - Omzet > 50 Milyar

3. HPP PPN

Terdapat perbedaan periode akuntansi dan periode perpajakan dalam pelaksanaannya, yaitu: Periode Akuntansi diakui sejak 1 Januari s/d 31 Desember. Hal ini berbeda dengan periode yang diakui oleh Dirjen Pajak. Periode yang diakui oleh Dirjen Pajak yaitu untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) pada 1 April s/d 31 Maret. Sedangkan WP Pajak Badan periodenya pada 1 Mei s/d 30 April. Selain itu terdapat perbedaan lapisan tarif pajak yang harus diketahui, yaitu:

Tabel 1 Perbedaan Lapisan Tarif Pajak

Lapisan Tarip	UU PPH		UU HPP	
	Rentang penghasilan	Tarip	Rentang penghasilan	Tarip
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	>Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta -5 milyar	30%
V			> 5 milyar	35%

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Implementasi UU HPP yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan tentang Implementasi UU HPP telah dilaksanakan dengan baik. Guru-guru yang tergabung dalam MGMP Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Kabupaten Pemalang semakin memahami implementasi perubahan UU HPP sehingga nantinya akan mengajarkan hal ini kepada siswa di tingkat SMK. Hal ini sangat bermanfaat mengingat lulusan SMK dipersiapkan untuk dapat langsung bekerja setelah menempuh pendidikan. Kegiatan serupa diharapkan dapat dilakukan di daerah lain yang memang masih membutuhkan penjelasan teknis tentang UU HPP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BNSP, 2005. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja. Jakarta Direktorat Akademik Dirjen Dikti Depdiknas 2008. dalam <http://spm-fmipa-unesa.blogspot.com/2011/02/standar-kompetensi-lulusan-perguruan.html>

- [2] Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum), Jakarta 2008
- [3] M. Rosul Asmawi dalam Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 66-71 Hasil Pembelajaran, *Sumber: http://www.elektro.undip.ac.id/?page_id=226*
- [4] Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Sangat Penting. *Sumber : <http://www.pikiranrakyat.com/node/168910>*
- [5] Standar Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi, *Sumber :<http://spm-fmipa-unesa.blogspot.com/2011/02/standar-kompetensi-lulusan-perguruan.html>*
- [6] Survey Kompetensi Lulusan Fakultas Farmasi UNAIR, *Sumber : www.ff.unair.ac.id*
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.